

**SISTEM TATA KELOLA MOBILE PUSAT LAYANAN INTERNET
KECAMATAN (MPLIK) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
(Studi Kasus di Kotamadya Bukittinggi)**

TESIS



**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan
gelar Magister Teknik CIO Fakultas Teknik**

**Oleh:
DODI RADESA
NIM. 1108477**

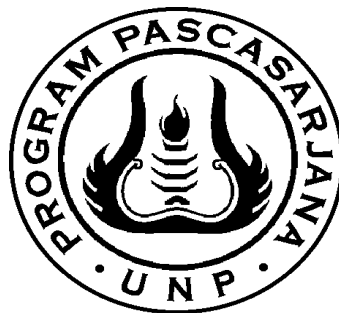
**PROGRAM STUDI PASCASARJANA CHIEF INFORMATION OFFICER
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2013

**SISTEM TATA KELOLA MOBILE PUSAT LAYANAN
INTERNET KECAMATAN (MPLIK) KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
(Studi Kasus di Kotamadya Bukittinggi)**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Magister Teknik CIO Fakultas Teknik Dalam Ujian Tesis*



Oleh:
DODI RADESA
NIM. 1108477

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed

Dr. Fahmi Rizal, M.Pd, M.T

**PROGRAM STUDI PASCASARJANA CHIEF INFORMATION OFFICER
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2013

**THE GOVERNANCE SYSTEM OF MOBILE INTERNET SERVICE
CENTER ON SUB DISTRICT (MOBILE PLIK) THE MINISTRY OF
COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY OF
INDONESIAN REPUBLIC (Case Study in Bukittinggi)**

ABSTRACT

The background of research was the implementation of Mobile PLIK service program in Bukittinggi seems that there is no permanent schedule of Mobile PLIK program and the location of operating Mobile PLIK. The purposes of research were to describe the mechanism policy and implementation of the governance system of MPLIK, to find out the weakness and strengthness of Mobile PLIK, and also to recomendate some suggestion to over come the weakness and strengthness of the implementation of Mobile PLIK governance system in the future.

This field research used the type of descriptive qualitative. The first location of the research was in the Ministry of Communication and Information Technology as the policy maker of Mobile PLIK program and the second location was Bukittinggi as the supporting area in operating Mobile PLIK. The key informants were the chairman of sub management working and the staff management working of universal service on financing and the development agency (BP3TI) and the next informant was the operator Mobile PLIK in Bukittinggi. The data were collected by interview, observation and study documentation.

The result of this study revealed that the implementation governance system of Mobile PLIK based on the policy of central government that is handled by The Ministry of Communication and Information Technology was general service control policy and not specific and also there was no optimal coordination with operator MPLIK in the implementation of Mobile PLIK in Bukittinggi.

ABSTRAK

Dodi Radesa. 2013. Sistem Tata Kelola Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Studi Kasus di Kotamadya Bukittinggi). Padang: Program Magister Chief Information Officer (CIO) Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena dan gejala tidak adanya jadwal program layanan MPLIK dan tempat pelaksanaan program layanan MPLIK di Kotamadya Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan implementasi sistem tata telola MPLIK, apa saja kekurangan dan kelebihan MPLIK serta alternatif masukan pada kekurangan dan kelebihan implementasi sistem tata kelola MPLIK di masa mendatang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi utama penelitian di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia selaku pembuat kebijakan program layanan MPLIK dan Kotamadya Bukittinggi sebagai lokasi pendukung dalam operasionalnya. Informan kunci penelitian ini Kasubag TU dan Staf TU BP3TI Kemkominfo dan informan pendukungnya operator MPLIK Kotamadya Bukittinggi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan implementasi sistem tata kelola MPLIK dari segi kebijakan MPLIK Pemerintah Pusat yang dibidangi Kementerian Komunikasi dan Informatika masih umum dan belum mengatur secara khusus serta tidak adanya koordinasi dengan operator MPLIK dalam implementasi program layanan MPLIK di Kotamadya Bukittinggi.

PERSETUJUAN PEMBIMBING AKHIR

Mahasiswa : DODI RADESA

NIM : 110847

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed</u> Pembimbing I	_____	_____
<u>Dr. Fahmi Rizal, M.Pd, M.T</u> Pembimbing II	_____	_____
Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang	Ketua Program Studi S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang	
<u>Drs. H. Ganefri, M.Pd, Ph.D</u> NIP. 19631217 198903 1 003	<u>Dr. Fahmi Rizal, M.Pd, M.T</u> NIP. 19591204 198503 1 004	

**PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS MAGISTER
CHIEF INFORMATION OFFICER**

Dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis
Program Magister *Chief Information Officer*
Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
Tanggal: 01 April 2013

No.	Nama	Tanda Tangan
1	<u>Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed, M.T</u> (Ketua/Pembimbing I/Penguji)	_____
2	<u>Dr. Fahmi Rizal, M.Pd, M.T</u> (Sekretaris/Pembimbing II/Penguji)	_____
3	<u>Drs. H. Ganefri, M.Pd, Ph.D</u> (Anggota)	_____
4	<u>Muhammad Adri, S.Pd, M.T</u> (Anggota)	_____
5	<u>Mukhlidi Muskhir, S.Pd, M.Kom</u> (Anggota)	_____

Padang, 01 April 2013
Program Magister Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
Ketua,

Dr. Fahmi Rizal, M.Pd, M.T
NIP. 19591204 198503 1 004

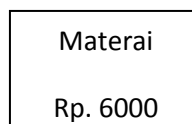
SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul “Sistem Tata Kelola Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Studi Kasus di Kota Bukittinggi” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 01 April 2013

Saya yang menyatakan



Dodi Radesa

NIM. 1108477

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia pada setiap ciptaanNya. Shalawat dan salam semoga Allah sampaikan pada teladan sepanjang masa, komandan tertinggi pejuang Islam Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa meninggikan kalimatullah di muka bumi ini.

Alhamdulillah, penulisan tesis ini dengan judul **"SISTEM TATA KELOLA MOBILE PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN (MPLIK) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus di Kota Bukittinggi)"** dapat terselesaikan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Pascasarjana *Chief Information Officer* FT UNP. Penghormatan dan ungkapan cinta terbesar penulis tujukan kepada Ayahanda Damsar dan Ibunda Sudarti yang telah memberikan segala tumpahan kasih sayang dan cinta. Semoga Allah SWT melimpahkan segala curahan kasih dan sayangNya selalu untukmu ayah dan ibuku. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Ir. H. Tifatul Sembiring, selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang telah bekerjasama dengan Universitas Negeri Padang membuka program *Magister CIO* FT UNP dan memberikan kesempatan pada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang Pascasarjana *Magister Chief Information Officer*.
2. Bapak Drs. Hanif Hoesin, selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi Kominfo Kementerian Kemkominfo yang memberikan segala bantuan tidak terhingga kepada penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan pada jenjang Pascasarjana *Magister CIO*.
3. Bapak Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed selaku pembimbing satu dan Ketua Program Doktor FT UNP, serta Bapak Dr. Fahmi Rizal, M.Pd, M.T selaku

pembimbing dua dan Ketua Program Pascasarjana FT UNP yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.

4. Bapak Drs. H. Ganefri, M.Pd, Ph.D selaku kontributor dan selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang yang telah mengarahkan, memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini serta memberikan kesempatan, bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
5. Bapak Muhammad Adri, M.Pd, M.T selaku pembahas satu serta Pengelola Program Studi Pascasarjana *Chief Information Officer* dan Bapak Mukhlidi Muskhir, S.Pd, M.Kom selaku pembahas dua yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, Direktur, Asisten Direktur, beserta bapak/ibu dosen Program Studi Pascasarjana *Chief Information Officer* FT UNP dan staf yang telah banyak memberikan segala bantuan dan kemudahan selama perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
7. Keluarga besar Kemkominfo terutama Balitbang dan Literasi SDM Kominfo serta Bapak Suyanto, M.Com selaku Kasubag TU dan Bapak Agus Supono, M.Com selaku staf TU BP3TI Kemkominfo yang memberikan segala informasi dan dokumen kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kakanda Suyanto, Peri Irawan dan istri juga keponakan tercinta Lugas Bona Ramadhan, Shella, Echa dan Hasbiy yang menjadi inspirasi penulis.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Pascasarjana *Magister Chief Information Officer* FT UNP, serta ukhti Usisa Ridaya, S.Pd, *best of the best and special friend* penulis dalam menggapai masa depan.

Semoga segala bantuan telah yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan pahala serta kebaikan yang tidak terhingga dari Allah SWT. Besar harapan semoga tulisan ini bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa mendatang. Penulis menyadari kelemahan dan kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu penulis berharap atas kritik dan saran besar harapan semoga segala salah dan khilaf kita semua dimaafkan Allah SWT, Amin ya Rabbal 'alamin.

Padang, Maret 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING AKHIR	iii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	11
1. Implementasi Sistem Tata Kelola TI	11
a. Struktur Sistem Tata Kelola TI	11
b. Proses Sistem Tata Kelola TI	13
2. Tata Kelola Internet	23
a. Sejarah Regulasi Internet	25
b. Definisi Tata Kelola Internet	27
3. Kebijakan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)	27
a. Pengertian MPLIK	28
b. Tujuan MPLIK	29
c. Regulasi MPLIK	29
d. Fasilitas MPLIK	29
e. Perbedaan PLIK dan MPLIK	30
B. Kerangka Berfikir	31
C. Pertanyaan Penelitian	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Informan	34
D. Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	38
1. Kebijakan Sistem Tata Kelola MPLIK Kemkominfo	38
2. BP3TI Kemkominfo Badan Penanggung Jawab Program MPLIK	40
3. Sistem Tata Kelola MPLIK Kemkominfo	42
a. Implementasi Program Layanan MPLIK.....	42
b. Struktur Sistem dan Proses Sistem Tata Kelola MPLIK	43
B. Program Layanan MPLIK di Kotamadya Bukittinggi	53
1. Monografi Kotamadya Bukittinggi	53
2. Proses Kotamadya Bukittinggi Mendapatkan MPLIK	54
3. Implementasi Program Layanan MPLIK di Kotamadya Bukittinggi	55
a) Kelengkapan Infrastruktur Sarana MPLIK	55
b) Tugas dan Peran Pemko Bukittinggi	56
c) Tugas dan Peran Penyedia Jasa.....	58
C. Pembahasan	62
1. Kebijakan Sistem Tata Kelola MPLIK	69
2. Implementasi Program Layanan MPLIK di Kotamadya Bukittinggi	69

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan.	72
B. Implikasi	73
C. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
--------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Proses sistem tata kelola TI, Jogiyanto dan Willy Abdillah	14
2. Stuktur dan peran tata kelola TI, Detiknas.....	20
3. Jaringan Internet Working, Modul UN-APCICT.....	24
4. Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan Kemkominfo	28
5. Kerangka berfikir	31
6. Bagan Alur Sistem Tata Kelola MPLIK dan Implementasi di Kota Bukittinggi Hasil Penelitian	61
7. Bagan Struktur Organisasi Pengelola Sistem Tata Kelola MPLIK Hasil Penelitian.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kisi-Kisi Penelitian	78
2. Validasi Kisi-kisi, SK Pembimbing, Surat Ijin Penelitian dan Balasan.	93
3. Hasil Observasi dan Wawancara.....	99
4. Tabel Perbandingan Implementasi MPLIK	129
5. Dokumen Penelitian	132
6. Kebijakan/regulasi MPLIK	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat telah terjadi di bidang Telematika atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dikenal dengan istilah *Information and Communication Technology (ICT)*. Berbagai macam inovasi dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melahirkan konvergensi layanan atau jasa-jasa baru yang tidak hanya terbatas pada lingkup telekomunikasi. Perkembangan itu meluas pada pelayanan media (penyiaran) dan informatika di Indonesia.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berperan penting dalam pembangunan bangsa. Tersebar luasnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bukanlah tujuan akhir, sebab teknologi informasi dan komunikasi tetaplah sebagai alat agar masyarakat Indonesia sejahtera. Beberapa penelitian terbaru mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu negara sedikit banyak dipengaruhi oleh infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (Wawan dan Iwan, 2011).

Pengembangan terkini web 2.0 yang berbasis jejaring sosial, akan mengakibatkan terjadinya pengembangan-pengembangan teknologi terbaru. Peran teknologi informasi dan komunikasi informasi dalam mensejahterakan masyarakat semakin meningkat. Seringkali diasumsikan bahwa media komunikasi baru yang bernama internet tidak dapat diregulasi.

Modul 5 UN-APCICT bertujuan untuk mengklarifikasi isu-isu tentang regulasi dan untuk menunjukkan bagaimana kerjasama internasional dalam pengaturan internet dapat tercapai. Internet diciptakan bukan untuk menciptakan jaringan komunikasi yang mampu bertahan dari serangan nuklir, tetapi untuk memungkinkan para ilmuwan untuk saling berbagi ilmu komputer untuk memecahkan masalah-masalah komputasi yang rumit. Komputer pada saat itu merupakan sebuah peralatan yang besar dan mahal serta tersebar di lokasi-lokasi yang saling berjauhan.

Metode untuk menghubungkan komputer-komputer tersebut menggunakan protokol yang ditemukan pada tahun 1960an dan memungkinkan untuk mengirimkan pesan-pesan, transaksi komputer ke dalam paket-paket dan kemudian menggabungkannya kembali di bagian penerima. Jika pesan tidak diterima dengan baik, maka akan dikirim ulang. Metode transmisi seperti ini membutuhkan *router-router* untuk mengarahkan kemana pesan pergi dan pesan-pesan tersebut akan menemukan jalannya melalui jaringan (Modul 5 UN-UPCICT, 2009).

Internet working protocol membantu pesan-pesan melewati jaringan-jaringan yang berbeda-beda. *International Telecommunication Union* (ITU), lembaga PBB yang didirikan untuk mengatur kerjasama telekomunikasi global. ITU melakukan pengembangan beberapa standar dan protokol serta mendukung protokol *Internet working*.

Selain faktor kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat. Faktor *regulasi* sebagai *enabler* dan *framework* dari terciptanya kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat secara luas serta memiliki peranan yang sangat penting. Pemerintah sebagai pihak regulator memastikan regulasi berjalan dengan baik diantaranya memiliki kewajiban sebagai *pengatur*, *pengawas* dan *pengendali* terhadap penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia.

Konvergensi teknologi informasi dan komunikasi dapat mengintegrasikan pengaturan (*regulasi*) telekomunikasi dengan media penyiaran (*broadcasting*), telekomunikasi dengan internet, internet dengan penyiaran. Dimungkinkan adanya potensi integrasi jaringan telekomunikasi dan isi penyiaran (*broadcasting content*). Teknologi digitalisasi dan kapasitas pita lebar (*broadband*) juga telah dibangun serta infrastruktur internet sebagai penyedia jasa telekomunikasi (Wawan dan Iwan, 2011).

Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di dunia semakin maju dan berkembang. Dampak kemajuan itu terasa ke seluruh pelosok bumi, termasuk di Indonesia. Perkembangan teknologi menyentuh

aspek pemerintahan baik untuk peningkatan kinerja internal organisasi, maupun terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Disisi lain, industri TIK merupakan salah satu sektor strategis bagi pembangunan nasional. Pertumbuhan industri TIK sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Infrastruktur telekomunikasi memegang peran utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga keamanan dan integritas, memfasilitasi pengembangan pendidikan, kesehatan serta membantu kegiatan pemerintah secara keseluruhan (Modul 2 UN-UPCICT, 2009).

Implementasi e-government untuk mewujudkannya diperlukan dukungan data yang komprehensif yang meliputi *hardware*, *software*, infrastruktur jaringan dan perangkat Sumber Daya Manusia (SDM). Data ini sangat diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan investasi jangka panjang yang tepat guna dan sesuai kebutuhan. Layanan Internet telah melingkupi wilayah yang dapat dijangkau oleh telepon kabel. Layanan internet nir kabel (*wireless*) tersedia untuk wilayah-wilayah kota dan ibukota kabupaten (Ardi Hamzah, 2010).

Pengguna Internet semakin meningkat, terutama di perkantoran (pemerintah maupun swasta), lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi), serta diikuti dengan meningkatnya jumlah warung internet (warnet). Industri pengembang perangkat lunak (*software*) sangat minim. Masih sedikit organisasi (pemerintah dan swasta) yang menggunakan sistem informasi secara profesional. Kalaupun ada, produk yang dihasilkan masih bersifat sederhana serta penggunaannya hanya pada organisasi menengah kecil tertentu (Modul 5 UN-UPCICT, 2009).

Komunikasi berbasis teknologi seluler diprediksi akan menjadi tulang punggung infrastruktur komunikasi di Indonesia pada masa depan. 3G dan 4G akan semakin berkembang dan komunikasi berbasis *fixed line* juga akan berkembang ke arah *fiber optic* atau teknologi *broadband* lainnya. Perkembangan konten lokal semakin meningkat sehingga lalu lintas data lokalpun semakin padat. Begitu juga komunikasi berbasis protokol internet seperti *IP-TV*, *IP-Phone/VoIP*, *Video On Demand (VoD)*, *Teleconference* dan

lain-lainnya. Pertumbuhan pengguna akan terus berkembang tidak hanya pada perkantoran dan industri, tetapi akan meluas pada pengguna individual.

Keterbukaan informasi sebagai sebuah dampak dari perkembangan TIK menjadikan perubahan bentuk layanan yang diberikan pemerintah kepada publik. Pemerintah akan menjadi lembaga layanan bagi berbagai kepentingan publik yang profesional, cepat-tanggap dan transparan serta akuntabel. Pemenuhan layanan publikpun dapat dilakukan tanpa dengan mengunjungi kantor pemerintahan, semisal melalui *website* dan *email* ataupun pesan singkat (SMS).

Ikatan sosial publik terbangun dalam sebuah jejaring tanpa batas negara yang dikenal dengan jejaring sosial. Bila tidak diikuti dengan penguatan ikatan sosial di ranah kehidupan, maka dapat terjadi dehumanisasi di lingkungan interaksi langsung publik. Solidaritas dapat terjadi tidak lagi dalam sebuah batas administrasi wilayah ataupun batas negara. Kesatuan masyarakat internasionalpun memungkinkan terbangun, semua itu mustahil terlaksana tanpa dukungan infrastruktur yang memadai (Modul 5 UN-UPCICT, 2009).

Tata kelola atau manajemen merupakan hal yang sangat penting dalam proses kelancaran dan suksesnya visi, misi dan tujuan sebuah organisasi terlebih lagi lembaga atau institusi negara pada era reformasi ini, dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik (Ardi Hamzah, 2010). Tata kelola yang sering dipahami dengan memenej, mengelola, menata dan mengatur membutuhkan seni pengaturan, pengurusan serta penataan agar visi, misi dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Adanya reformasi dan berbagai Undang-undang yang diterbitkan pemerintah berdampak pada Lingkungan Teknologi Informasi dan Pemerintahan seperti : *Inpres Kebijakan Strategis Pengembangan e-Government, no. 3 tahun 2003, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik no. 11 tahun 2008, Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik no. 14 tahun 2008, Undang-undang Pelayanan Publik no. 25 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah no. 60 tahun*

2008 sangat berdampak bagi peningkatan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Implementasi Undang-Undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah memerlukan dukungan infrastruktur yang layak dan merata, agar SI/TI menjadi optimal. Optimalisasi SI/TI disetiap lini kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Hal itu membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, nomor 19/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Penyedia Jasa Akses Internet pada Pelayanan Wilayah Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan, berupa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

Permen Kominfo no.19 tahun 2010 merupakan implementasi dari mandat *International Telecommunication Union* lembaga PBB yang bergerak dalam bidang teknologi informasi yang merupakan perwujudan dari pemerataan akses informasi secara adil dan merata yang ditandai oleh infrastruktur yang lengkap. Permen itu juga selaras dan sejalan dengan visi, misi dan lima sukses Kominfo yaitu: Sebagai pilar penting penggerak pembangunan, pembangkit dan penyerap tenaga kerja, sumber devisa baru, pilar penting pencerdas bangsa, dan sebagai alat demokrasi dan pemersatu bangsa (Kemkominfo, 2011).

Pemerataan akses internet adalah hal mutlak, hal inilah yang menjadi latar belakang salah satu program Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berupa MPLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan). Mobile PLIK (MPLIK) adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang bersifat bergerak untuk akses internet yang sehat, aman, cepat dan murah. Tujuannya adalah melayani daerah-daerah kecamatan yang belum terjangkau akses internet. Program ini pada tahun 2011 ditargetkan 1.907 unit MPLIK tersebar diseluruh Indonesia ini adalah kelanjutan dari program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) yang telah digagas sebelumnya.

PLIK seperti "warnet" atau warung internet yang disubsidi dari departemen komunikasi dan informasi untuk menyediakan akses internet di seluruh Indonesia, baik di kota atau di desa-desa terpencil. PLIK ditempatkan instansi pemerintah di tingkat kecamatan. Sementara itu, MPLIK penggunaannya lebih luas karena dioperasikan oleh sebuah kendaraan/mobil yang dapat menjangkau daerah-daerah yang sangat terpencil dan terbelakang.

Fasilitas yang ada dalam MPLIK berupa: notebook, server, UPS, DVD player, TV LCD, dan genset untuk menyediakan listrik. Layanan ini dapat digunakan oleh sekolah atau instansi pemerintah di kabupaten. PLIK dan MPLIK bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia berbasis Informasi, secara bertahap hingga tahun 2025. Program pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan integritas pengembangan serta pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan komunikasi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Layanan ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati informasi berupa akses internet.

Observasi awal yang penulis lakukan di Kotamadya Bukittinggi terindikasi di lapangan MPLIK terlihat sebagai pajangan di kecamatan-kecamatan yang mendapatkan bantuan program MPLIK ini. Masyarakat terlihat kurang antusias untuk memanfaatkan program layanan MPLIK, sehingga program layanan MPLIK sepi pengunjung. Bahkan program layanan MPLIK ini, seolah-olah asing/aneh dan bahkan dijuluki mobil kura-kura ninja. Apabila kita ingin mengetahui informasi keberadaan dan cara-cara mendapatkan layanan program MPLIK ini, tidak ada informasi yang bisa kita dapatkan baik berupa papan informasi, pamflet ataupun spanduk.

Upaya meminimalisir hal-hal negatif itu diperlukan adanya sebuah perencanaan yang matang tentang sistem tata kelola (*governance*) dan pengembangan MPLIK ini. Ada tiga sasaran utama dari upaya penerapan tata kelola TI dalam suatu organisasi/pemerintah. *Pertama*, memperbaiki efisiensi kerja dengan melakukan otomasi berbagai proses yang mengelola informasi. *Kedua*, meningkatkan keefektifan manajemen dengan memuaskan kebutuhan informasi guna pengambilan keputusan. *Ketiga*, memperbaiki daya saing atau

meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi dengan merubah gaya dan cara berbisnis (Ari Wedhasmara,2002).

Penulis melihat ada beberapa faktor dan gejala permasalahan seperti panduan sistem tata kelola Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan yang belum baku, ini di tandai dengan adanya seminar dan diskusi pada tanggal 28 Januari 2010 bertempat di Hotel Millenium Jakarta. BTIP menyelenggarakan Forum Diskusi Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Pusat Layanan Internet Kecamatan (SIMMPLIK).

Forum diskusi tersebut diselenggarakan dalam rangka memperoleh masukan dari *stakeholders* pertelekomunikasian baik dari regulator (Depkominfo dan BRTI), akademisi dari ITB, UI, UGM, ITS dan Binus, praktisi serta prinsipal (vendor) perangkat telekomunikasi, dimana masukan-masukan tersebut akan dikaji dan diimplementasikan dalam pengoperasian SIMMPLIK oleh BTIP (Kemkominfo, Btip dan Postel, 2010). Di samping itu dalam pelaksanaannya, ada sebagian kepala daerah yang menolak bantuan program ini sebut saja Gubernur Gorontalo merespon negatif program layanan MPLIK ini dengan menjelaskan bahwa daerah tidak memiliki biaya operasional.

Implementasi MPLIK di Kotamadya Bukittinggi berdasarkan *grand tour* penulis pada tanggal 27-31 Agustus 2012, teridentifikasi program layanan MPLIK bahwa: belum adanya jadwal program layanan MPLIK yang tetap, alokasi tempat pelaksanaan program layanan MPLIK tidak pasti, pelanggan MPLIK sepi dan tidak bertambah. Di samping itu belum adanya sosialisasi tentang program ini dari pemerintah di kecamatan, kelurahan, ataupun pada tingkat pemerintahan terendah kepada masyarakat. Berdasarkan gejala dan fenomena permasalahan dari implementasi program layanan MPLIK di Kotamadya Bukittinggi, penulis tertarik membahasnya dengan judul: "***Sistem Tata Kelola Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Studi Kasus di Kotamadya Bukittinggi)***".

B. Identifikasi Masalah

Faktor-faktor yang perlu diidentifikasi dalam permasalahan implementasi program layanan MPLIK di Kotamadya Bukittinggi diantaranya adalah:

1. Panduan sistem tata kelola Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kemkominfo yang tidak ada.
2. Pelaksanaan di lapangan tidak terlihat penjadwalan yang tetap dan pelaksanaannya bersifat *opensource* yang perlu untuk diketahui latar belakangnya.
3. Masyarakat dan pegawai instansi pemerintah terlihat kurang antusias mengunjungi program layanan MPLIK di Kota Madya Bukittinggi dengan indikasi MPLIK yang jarang terlihat keberadaannya, sepi pengunjung dan tidak adanya sosialisasi baik berupa spanduk, papan informasi atau pamflet tentang MPLIK.

C. Batasan Masalah

Mengenai permasalahan ini, penulis memberikan batasan masalah yaitu:

1. Kebijakan sistem tata kelola MPLIK Kemkominfo RI dan implementasi program layanan MPLIK di Kotamadya Bukittinggi.
2. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan instrumen lembar observasi dan wawancara, menghasilkan data berupa informasi dan dokumen agar data terjaga keabsahannya maka dianalisa dengan teknik analisis data serta diperkuat dengan triangulasi data.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diteliti dapat dirumuskan permasalahannya dengan:

1. Bagaimana Kebijakan Sistem Tata Kelola Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia?

2. Bagaimana Implementasi Sistem Tata Kelola MPLIK di Kotamadya Bukittinggi yang meliputi:
 - a. Apa saja kekurangan dan kelebihan sistem tata kelola MPLIK di Kotamadya Bukittinggi?
 - b. Seperti apa rekomendasi optimalisasi sistem tata kelola MPLIK di Kotamadya Bukittinggi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengungkapkan bagaimana kebijakan dan implementasi sistem tata kelola Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
2. Mengungkapkan bagaimana implementasi sistem tata kelola MPLIK Kotamadya Bukittinggi yang meliputi:
 - a. Kekurangan dan kelebihan sistem tata kelola MPLIK di Kotamadya Bukittinggi.
 - b. Rekomendasi optimalisasi sistem tata kelola MPLIK di Kotamadya Bukittinggi

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk:

1. Menambah pengetahuan penulis dalam pengembangan karya ilmiah khususnya Sistem Tata Kelola MPLIK.
2. Sumbangan pemikiran bagi pengembangan sistem tata kelola MPLIK di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia agar dalam implementasi MPLIK lebih terorganisir, terjadwal dan terarah sehingga masyarakat tertinggal dan lemah dapat menikmati pemerataan akses internet pada program MPLIK ini.
3. Sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah bahwa program MPLIK ini sangat penting dan sama dengan program pemerintah yang lainnya, karena

MPLIK merupakan infrastruktur bagi masyarakat tertinggal dan lemah dalam mengakses informasi melalui TI, terutama jaringan internet.

4. Bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan khususnya Fakultas Teknik *Magister Chief Information Officer* Universitas Negeri Padang, sebagai karya ilmiah dan sumbangan pemikiran dalam ranah pengetahuan teknis pengembangan Sistem Tata Kelola MPLIK.
5. Bahan bagi peneliti lainnya agar melanjutkan penelitian ini, dengan topik-topik kajian lainnya.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari sistem tata kelola MPLIK Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (studi kasus di Kotamadya Bukittinggi) dalam penelitian ini adalah:

1. Kebijakan sistem tata kelola MPLIK Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia prosesnya dapat dilihat dari: 4 (empat) sistem struktur (struktur hak keputusan/*archetype*, aktiva manusia, regulasi, standar dan panduan umum) dan 7 (tujuh) sistem proses (mekanisme proses perencanaan dan keputusan, mekanisme penyalarsan strategi bisnis, mekanisme implementasi keputusan, mekanisme pengawasan dan pengarahan perilaku pengguna, mekanisme evaluasi serta mekanisme implemementasi di lapangan) sebagian besar berjalan sesuai mekanisme pendapat ahli TI, namun pada proses pembuatan regulasi program MPLIK Kemkominfo tidak melibatkan Pemda, regulasi masih umum dan belum dalam bentuk petunjuk teknis/khusus yang mengikat serta tidak adanya buku panduan tentang program layanan MPLIK.
2. Implementasi sistem tata kelola MPLIK di Kotamadya Bukittinggi belum terlaksana dan berjalan secara optimal dengan berbagai kelemahan, yaitu:
 - a. Tidak terlihat adanya koordinasi antara Pemko Bukittinggi dengan penyedia jasa dan operator MPLIK dalam pelaksanaan program layanan MPLIK.
 - b. Dalam pengoperasian layanan MPLIK masih terbatas. Keterbatasan ini dari sisi lokasi, waktu dan penjadwalan layanan MPLIK yang belum ada serta keterbatasan prasarana penunjang MPLIK seperti Bahan Bakar Minyak dan listrik.
 - c. Kecepatan loading internet MPLIK (band wicthnya 256Kbps) sehingga loading internetnya lambat karena keterbatasan band wicth.

- d. Tidak adanya Perda Kotamadya Bukittinggi tentang MPLIK, karena regulasi/peraturan dari setiap program, kegiatan dan pelaksanaan tugas yang dilakukan disetiap daerah khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan harus didukung dan diperkuat dengan regulasi/peraturan agar berjalan dengan maksimal dan tidak menyalahi aturan dan hukum.
- e. Tidak adanya sosialisasi program MPLIK kepada masyarakat.

B. IMPLIKASI

Implikasi dari hasil temuan sistem tata kelola MPLIK Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (studi kasus di Kotamadya Bukittinggi) dalam penelitian ini berupa rekomendasi optimalisasi sistem tata kelola MPLIK di Kotamadya Bukittinggi yaitu:

1. Kebijakan MPLIK dalam Permen Kominfo no.19 tahun 2010 masih umum dan belum dalam bentuk petunjuk khusus/teknis yang mengikat Pemda/Pemko. Kebijakan MPLIK yang masih umum membuat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam pelaksanaan tugas serta peran tidak terlihat dalam program layanan MPLIK. Hal ini terlihat dari perencanaan program layanan MPLIK hanya melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Infrastruktur Daerah Tertinggal dan tidak melibatkan Pemda serta dalam operasional MPLIK di Kotamadya Bukittinggi tidak ada koordinasi dengan operator MPLIK. Agar program ini menjadi optimal maka peran dan koordinasi dengan Pemda/Pemko ditingkatkan untuk membantu suksesnya program layanan MPLIK dengan membuat petunjuk teknis/khusus yang mengikat Pemda/Pemko.
2. Kemkominfo belum menerbitkan buku panduan tentang program MPLIK karena masih dalam penggodokan. Buku panduan program MPLIK harus segera diterbitkan agar masyarakat menjadi paham tentang program MPLIK dan isu-isu negatif tentang program MPLIK menjadi terjawab.
3. Pemko Bukittinggi tidak terlihat berkoordinasi maksimal dengan penyedia jasa dan operator MPLIK karena tidak adanya Perda tentang program

MPLIK di Kotamadya Bukittinggi, sosialisasi, jadwal penentuan lokasi serta waktu dalam pemberian layanan MPLIK kepada masyarakat. Hal itu harus diatasi Pemko Bukittinggi dengan membuat Perda tentang MPLIK, sosialisasi dan jadwal layanan MPLIK kepada masyarakat serta meningkatkan koordinasi dengan penyedia jasa dan operator MPLIK.

C. Saran

Saran/rekomendasi pada penelitian Sistem Tata Kelola MPLIK Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (studi kasus di Kotamadya Bukittinggi) ditujukan kepada:

1. Pihak Kemkominfo Republik Indonesia agar membuat regulasi detail/petunjuk khusus tentang program layanan MPLIK sehingga mengikat setiap *stakeholders* yang terlibat dan menerbitkan buku panduan MPLIK.
2. Pihak Pemko Bukittinggi agar mendukung, bekerjasama dan berperan aktif menyukseskan program layanan MPLIK dengan membuat Perda, jadwal, sosialisasi dan memfasilitasi serta memberdayakan program layanan MPLIK.
3. Operator MPLIK untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja serta koordinasi dengan Pemko Bukittinggi dalam mengoperasikan program layanan MPLIK.
4. Masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas program layanan MPLIK secara optimal dengan mengakses informasi melalui Sistem Informasi/Teknologi Informasi terutama internet sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 2007, *Manajemen Penelitian* Jakarta: PT Rineka Cipta
- Arikunto Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara
- Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan, Modul 5 Tata Kelola Internet*, Incheon, Republik Korea: 2009, UN-APCICT: Ang, Peng Hwa. 2009. *Ordering Chaos: Regulating the Internet*. Singapore: Thomson
- Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan, Modul 2 Kebijakan, Proses dan Kelola TIK untuk Pembangunan*, Incheon, Republik Korea: 2009. UN-APCICT
- Aziz Sanapiah, A, 2012, Makalah Dimensi Kepemimpinan Aparatur Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Building the Trust, Jakarta: STIA LAN
- Jakarta: Gibson, JL., Ivancevich, JL., dan Donnelly, JH. 1992. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Cetakan Kelima. Jakarta: PT Erlangga.
- Bailey, Stephen J, 1999, *Local Government Economics-Principle and Practice*.
- Bennis, W.G, and B. Nanus, 1985, *Leaders: The Strategies for Taking Change*. New York: Happer and Row. MacMillan Press LTD, Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG216XS.
- Dunn, William N, 2000, *Public Policy Analysis: An Introduction* (Indonesian Edition). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ensiklopedia Umum, 1993, Yogyakarta: Kanisius.
- Gibson, JL., Ivancevich, JL., dan Donnelly, JH. 1992. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Cetakan Kelima. Jakarta: PT Erlangga.
- Hamzah, Ardi, *Tata Kelola Teknologi Informasi: Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2010 (SNATI 2010)*
- J. Maleong Lexy, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT: Remaja Rosda Karya, Cet ke-5
- Katie Hafner dan Mathew Lyon, *Where Wizards Stay Up Late: the Origins of the Internet* (New York: Simon and Schuster, 1998).